

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini olahraga tidak hanya menjadi aktivitas untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh, melainkan telah menjadi industri dengan nilai jutaan dolar. Berbagai macam acara olahraga internasional telah diselenggarakan dalam cabang dan skala yang berbeda-beda. Terdapat acara olahraga internasional yang menyelenggarakan berbagai cabang olahraga dalam perhelatannya seperti Olimpiade, *Asian Games*, *European Games*, dan sebagainya. Ada juga kejuaraan dunia untuk cabang olahraga tertentu seperti Piala Dunia Sepak Bola, Kejuaraan Dunia Badminton, Piala Dunia Bola Basket dan sebagainya. Adapun di bidang terkait dengan otomotif, terdapat acara olahraga balap internasional seperti Formula 1, Formula E, MotoGP, dan sebagainya.

Dari berbagai macam acara olahraga internasional yang ada tersebut, negara-negara di dunia saling bersaing memperebutkan posisi sebagai penyelenggara. Beberapa waktu yang lalu sendiri, Indonesia baru saja menyelenggarakan salah satu acara olahraga terbesar di tingkat regional, yaitu *Asian Games* 2018. Indonesia berhasil menjadi tuan rumah acara tersebut setelah di pilih oleh *Olympic Council of Asia* (OCA) pada 20 September 2014 menggantikan Vietnam yang mengundurkan diri (BBC Indonesia, 2014). Acara ini diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus - 2 September 2018 di dua kota yaitu Jakarta dan Palembang (Tangkudung et al., 2019).

Seiring dengan berkembangnya globalisasi, negara tidak lagi menjadi aktor satu-satunya yang bersaing untuk menjadi penyelenggara acara olahraga internasional. Saat ini, pemerintah daerah suatu negara juga ikut bersaing untuk menjadi penyelenggara acara olahraga internasional, seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang bekerja sama dengan *Formula E Operations Limited* (FEO) untuk menyelenggarakan Formula E Jakarta. Seakan belum puas setelah menjadi tuan rumah Asian Games 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pimpinan Gubernur Anies Baswedan berencana menyelenggarakan acara balap mobil internasional Formula E. Jakarta sendiri berhasil menjadi tuan rumah acara ini setelah diumumkan oleh FEO melalui situs resmi Formula E (CNN Indonesia, 2019b).

Rencana awalnya Jakarta akan menjadi tuan rumah seri balapan Formula E pada 6 Juni 2020 (CNN Indonesia, 2019b). Namun, penyelenggaraan tersebut terpaksa ditunda karena adanya pandemi Covid-19 (Kompas, 2020b). Jakarta kemudian akan menyelenggarakan Formula E pada tahun 2022, tepatnya pada tanggal 4 Juni 2022. Jakarta resmi menjadi tuan rumah Formula E musim ke-8 ini setelah ditetapkan melalui *FIA World Motor Sport Council* di Paris, pada 15 Oktober 2021 (Jakpro, 2021).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Gubernur Anies Baswedan menyampaikan bahwa penyelenggaraan Formula E Jakarta ini merupakan hal yang penting, karena dapat menempatkan Jakarta pada peta percaturan dunia sebagai kota besar yang bisa menyelenggarakan acara olahraga internasional sekelas Formula E (Kompas, 2019a). Selain itu, penyelenggaraan Formula E Jakarta juga

dapat dimanfaatkan untuk mencapai berbagai kepentingan daerah seperti investasi, pariwisata, dan lingkungan (Kontan, 2019).

Sebagai ibukota Indonesia sendiri, DKI Jakarta tentunya menjadi salah satu aktor penting yang terlibat tidak hanya dalam urusan dalam negeri, namun juga luar negeri. Hal ini mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjalin hubungan dan kerja sama tersendiri dengan pihak asing, atau dengan kata lain melakukan paradiplomasi. Dalam studi hubungan internasional, paradiplomasi merupakan hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau lokal dengan pihak asing dalam rangka mencapai kepentingan tertentu (Mukti, 2013). Hubungan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan FEO dalam rangka menyelenggarakan Formula E Jakarta menjadi salah satu contoh paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penyelenggaraan Formula E Jakarta ini menjadi hal yang menarik karena jarang terjadi, di mana acara olahraga internasional diselenggarakan langsung oleh pemerintah daerah yang tentunya tidak memiliki nilai tawar yang kuat dan kedudukan yang tinggi dalam dunia internasional. Umumnya, penyelenggaraan acara olahraga internasional didominasi oleh negara atau lembaga negara yang memiliki *power* yang besar dalam dunia internasional, seperti dalam penyelenggaraan Asian Games 2018 dan MotoGP Mandalika 2022. Penyelenggaraan Asian Games 2018 dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dibantu oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tuan rumah (BeritaSatu, 2014). Sementara itu, MotoGP Mandalika 2022 diselenggarakan oleh *Indonesia Tourism Development Coporation* (ITDC)

(Liputan6, 2019). ITDC merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang pengembangan dan pengelolaan wilayah pariwisata (ITDC, n.d.). Dalam menyelenggarakan MotoGP Mandalika ini, ITDC juga dibantu oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) (Kumparan, 2022).

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan ini. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti mengenai proses paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penyelenggaraan Formula E. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai hubungan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan FEO dalam rangka menyelenggarakan Formula E Jakarta. Penelitian yang ada sendiri belum banyak yang membahas mengenai paradiplomasi pemerintah daerah di Indonesia terkait penyelenggaraan acara olahraga internasional. Penelitian ini akan menambah sudut pandang baru terkait paradiplomasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan acara olahraga internasional.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana proses paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penyelenggaraan Formula E?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus yang diuraikan sebagai berikut :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Dalam mencapai kepentingannya, pemerintah daerah suatu negara juga terlibat dalam hubungan internasional atau biasa disebut sebagai paradiplomasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai apa itu paradiplomasi, mengapa paradiplomasi penting bagi pemerintah daerah, dan bagaimana cara pemerintah daerah mencapai kepentingannya melalui paradiplomasi.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan mengenai proses paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penyelenggaraan Formula E. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai hubungan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan FEO dalam rangka menyelenggarakan Formula E Jakarta.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara akademis dan manfaat secara praktis yang diuraikan sebagai berikut :

### **1.4.I Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap disiplin Ilmu Hubungan Internasional, terutama terkait dengan paradiplomasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah suatu negara untuk menyelenggarakan acara olahraga internasional.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait dalam pembuatan kebijakan, terutama bagi pemerintah daerah di Indonesia yang ingin menyelenggarakan acara olahraga internasional.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Penelitian sebelumnya mengenai penyelenggaraan acara olahraga internasional oleh pemerintah daerah di Indonesia belum banyak dibahas. Penelitian yang sudah ada lebih banyak membahas penyelenggaraan acara olahraga internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahim Sazli (Sazli, 2016) membahas mengenai penyelenggaraan Asian Games 2018. Penelitian tersebut membahas mengenai motif Indonesia menyelenggarakan Asian Games yang didasari oleh dua kepentingan, yaitu politik dan ekonomi. Penelitian lainnya dilakukan oleh Miftahul Khauser (Khauser, 2020) yang juga membahas mengenai Asian Games 2018. Dalam penelitiannya, ia menganalisis diplomasi publik yang dilakukan Indonesia serta manfaat yang diperoleh Indonesia melalui Asian Games. Sementara itu, penelitian yang terkait dengan penyelenggaraan acara olahraga internasional oleh pemerintah daerah di Indonesia membahas mengenai Tour de Singkarak. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Ikhsan Alim (Alim, 2018) tersebut membahas mengenai pengaruh penyelenggaraan Tour de Singkarak terhadap peningkatan perekonomian Sumatera Barat melalui sektor pariwisata.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, penelitian ini akan membahas mengenai penyelenggaraan acara olahraga internasional oleh

pemerintah daerah di Indonesia. Dalam hal ini akan dibahas mengenai proses paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penyelenggaraan Formula E. Secara khusus, penelitian ini akan menjelaskan mengenai hubungan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan FEO dalam rangka menyelenggarakan Formula E Jakarta. Penelitian ini berupaya menambah sudut pandang baru mengenai paradiplomasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah suatu negara untuk menyelenggarakan acara olahraga internasional. Untuk menjelaskan permasalahan yang ada dalam penelitian ini sendiri, penelitian ini akan menggunakan konsep paradiplomasi dan teori sistem politik.

### **1.5.1 Paradiplomasi**

Istilah paradiplomasi atau *paradiplomacy* dimunculkan oleh Panayotis Soldatos dan Ivo Duchacik pada sekitar tahun 1980-an. Menurut Alexander S. Kusnetsov dalam bukunya yang berjudul *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational governments in international affairs*, paradiplomasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah regional terkait urusan internasional untuk mencapai kepentingan ekonomi, budaya dan sebagainya dengan aktor pemerintah asing dan non pemerintah asing (Kuznetsov, 2015). Sementara itu, Stefan Wolff melalui jurnalnya yang berjudul *Paradiplomasi: Scope, Opportunities, and Challenges* menjelaskan paradiplomasi sebagai kapasitas kebijakan luar negeri aktor *sub-state* untuk berpartisipasi dalam dunia internasional terlepas dari negara mereka dalam rangka mencapai kepentingan mereka sendiri (Wolff, 2007).

Dalam studi hubungan internasional sendiri, paradiplomasi merupakan fenomena yang masih relatif baru. Konsep paradiplomasi ini membahas mengenai perilaku dan kapasitas *'sub-state'* dalam melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing dalam rangka mencapai kepentingan mereka secara spesifik. Dalam hal ini, aktor *sub-state* yang dimaksud adalah pemerintahan regional atau lokal, yang secara tradisional berperan sebagai aktor dalam negeri. Pada era transnasional, pemerintah regional juga melakukan interaksi yang melintasi batas-batas negara mereka. Dalam beberapa kesempatan pemerintah regional juga perlu menyusun kebijakan kerja sama luar negerinya, dan dalam banyak kasus, pemerintah regional tidak selalu berkonsultasi dengan pemerintah pusat (Mukti, 2013).

Berdasarkan konsep paradiplomasi di atas, dapat diketahui bahwa *sub-state* atau pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya juga terlibat dalam hubungan internasional. Dalam menjalankan hubungan internasional, maka pemerintah daerah perlu membuat keputusan atau kebijakan luar negerinya tersendiri. Hal ini tentunya tidak terlepas dari proses persiapan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memutuskan untuk melakukan paradiplomasi. Untuk menjelaskan proses pembuatan keputusan atau kebijakan tersebut, penelitian ini akan menggunakan teori sistem politik yang dirumuskan oleh David Easton.

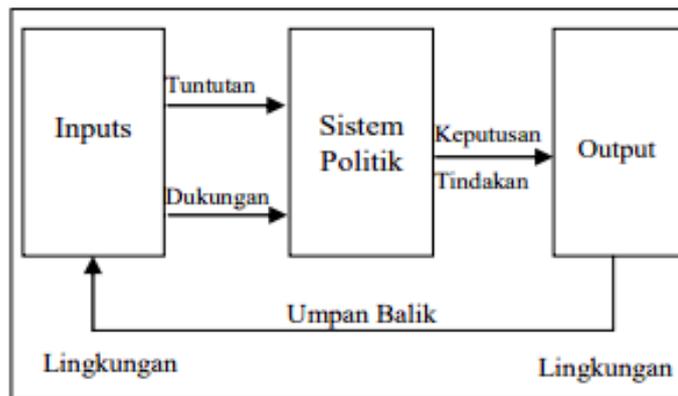
### **1.5.2 Teori Sistem Politik**

Menurut teori sistem politik yang dirumuskan oleh David Easton, keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan hasil konversi (proses) dari *inputs* yang diolah dalam sistem politik menjadi *outputs*. *Inputs* dalam sistem politik merupakan masukan kepada pemerintah berupa tuntutan maupun dukungan,

sementara itu *outputs* merupakan keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan proses politik yang telah berlangsung (Easton, 1988). Berikut adalah gambaran skema sistem politik menurut David Easton.

**Gambar 1.1**

**Skema Sistem Politik Menurut David Easton**



Sumber : (Magriasti, 2011)

Salah satu unsur dalam sistem politik yaitu *inputs*. *Inputs* terbagi menjadi 2 macam yaitu tuntutan (*demands*) dan dukungan (*support*). Tuntutan ini dapat berasal dari dalam sistem (pemerintah) maupun luar sistem (masyarakat). Sementara itu, *inputs* yang berupa dukungan dapat berupa sikap maupun pandangan yang menyetujui suatu keputusan atau kebijakan (Pribadi & Muhyidin, 2014). Unsur lain dalam sistem politik yaitu *outputs*. *Outputs* merupakan keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berupa tindakan, keputusan administrasi, dekret, maupun undang-undang (Easton, 1988).

Setelah sistem politik menghasilkan *outputs*, maka pemerintah akan mendapatkan *feedback* atau umpan balik. Jika keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan yang diharapkan maka pemerintah akan

mendapatkan dukungan. Sebaliknya, jika keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai maka dukungan akan berkurang. Proses munculnya *feedback* banyak dipengaruhi oleh unsur lingkungan atau *environment*. Lingkungan dalam hal ini yaitu semua sistem yang tidak termasuk ke dalam sistem politik, baik sosial maupun fisik (Pribadi & Muhyidin, 2014).

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.1 Definisi Konseptual**

#### **1. Paradiplomasi**

Paradiplomasi merupakan aktivitas hubungan luar negeri yang dilakukan oleh *sub-state* yaitu pemerintah daerah dengan pihak asing dalam rangka mencapai kepentingan tertentu. Pihak asing dalam hal ini yaitu aktor-aktor internasional berupa *state* (negara), *sub-state* (pemerintah daerah), atau *non-state* (aktor non-pemerintah) seperti *International Governmental Organization* (IGO), *International Non-Governmental Organization* (INGO), dan *Multinational Corporation* (MNC) (Mukti, 2013).

#### **2. Aktor**

Aktor merupakan setiap pihak yang terlibat dalam aktivitas hubungan internasional (Margono, 2015).

#### **3. Teori Sistem Politik**

Teori sistem politik merupakan proses pembuatan keputusan atau kebijakan oleh pemerintah. Dalam hal ini, keputusan atau kebijakan diperoleh melalui konversi (proses) dari masukan kepada pemerintah (*inputs*) untuk kemudian diolah

dalam sistem politik sehingga menghasilkan keputusan atau kebijakan (*outputs*) (Easton, 1988).

### **1.6.2 Definisi Operasional**

#### **1. Paradiplomasi**

Paradiplomasi dalam penelitian ini yaitu hubungan kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan FEO untuk menyelenggarakan Formula E Jakarta.

#### **2. Aktor**

Aktor dalam penelitian ini merupakan aktor *sub-state* yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan aktor *non-state* yaitu FEO.

#### **3. Teori Sistem Politik**

Teori sistem politik dalam penelitian ini yaitu proses pembuatan keputusan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui adanya masukan untuk menyelenggarakan Formula E di Jakarta yang kemudian di proses dalam sistem pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sehingga menghasilkan keputusan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencalonkan diri sebagai tuan rumah Formula E kepada FEO.

### **1.7 Argumen Penelitian**

Hubungan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan FEO dalam rangka menyelenggarakan Formula E Jakarta menjadi salah satu contoh paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini, penyelenggaraan Formula E Jakarta menjadi kepentingan utama

yang berhasil diraih oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kerja sama ini. Untuk bisa bekerja sama dengan FEO dan melakukan paradiplomasi, terdapat beberapa proses yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Awalnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan proses pembuatan kebijakan luar negeri terkait pencalonan DKI Jakarta sebagai tuan rumah Formula E, termasuk di dalamnya pencetusan ide, proses pembahasan pencalonan diri, hingga pembuatan keputusan untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah. Setelah diputuskan terkait pencalonan diri sebagai tuan rumah Formula E, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian mulai menghubungi dan melakukan negosiasi dengan FEO untuk bisa bekerja sama. Setelah melalui beberapa proses tersebut, DKI Jakarta kemudian bisa terpilih sebagai tuan rumah Formula E.

## **1.8 Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pada dasarnya, pendekatan kualitatif berupaya untuk mencari pemahaman (*understanding*) secara mendalam dari suatu kasus atau fenomena (Siyoto & Sodik, 2015). Penelitian ini berupaya mendalami proses paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran deskriptif atas suatu objek atau subjek penelitian (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Penelitian ini akan menguraikan secara deskriptif mengenai hubungan kerja sama yang dilakukan oleh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan FEO dalam rangka menyelenggarakan Formula E Jakarta.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian menurut Nasution merupakan lokasi penelitian di mana terdapat adanya pelaku, tempat dan kegiatan (Nasution, 2003). Penelitian ini berfokus pada Provinsi DKI Jakarta.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Moleong mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan atau orang yang memberikan informasi terkait dengan penelitian (Moleong, 2010). Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

### **1.8.4 Jenis Data**

Menurut Sugiyono terdapat dua jenis data yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini sendiri menggunakan data kualitatif seperti kata, skema, dan gambar (Sugiyono, 2015).

### **1.8.5 Sumber Data**

Sumber data penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data untuk penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua atau secara tidak langsung (Sugiyono, 2015).

### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti berusaha mengumpulkan data sekunder melalui studi pustaka. Studi pustaka yaitu proses mengumpulkan data yang relevan dengan masalah yang diteliti melalui buku, jurnal, dokumen, dan internet (Purwono, 2010).

### **1.8.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu proses menyusun secara sistematis data penelitian yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi pustaka untuk dipahami dan kemudian disimpulkan (Sugiyono, 2013). Penelitian ini akan menganalisis data yang telah didapat dan menghubungkannya dengan konsep yang ada, lalu mengambil kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti.

### **1.8.8 Kualitas Data**

Kualitas data merupakan standar untuk menentukan apakah suatu data dapat digunakan sebagai sumber penelitian yang akurat, lengkap, konsisten, dan tepat waktu. Penelitian ini berusaha mendapatkan data yang memenuhi aspek-aspek tersebut (Riyanto et al., 2020).